

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Dinas Koperasi dan Ukm
2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2021 merupakan pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018–2023. LKjIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018–2023).

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone. Komit mendalam penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : gambaran umum, struktur serta keragaman sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone, isu strategis, dan aspek strategis organisasi. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan. Valuasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Bone



Ir. WAHIDA, M.Si

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

i

ii



PENDAHULUAN

6



15



26



56

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone
disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014
dan dibagi dalam empat bab, yang terdiri dari :



1

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang meliputi:
Umum, Organisasi, Isu Strategis, dan
Aspek Strategis Organisasi.

2

Bab Kedua yaitu perencanaan kerja yang meliputi: Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan, Indikator Kinerja Utama,
Perjanjian Kinerja, dan Standar Penilaian Kinerja.




3

Bab Ketiga yaitu akuntabilitas kinerja
yang meliputi: Capaian Kinerja
Organisasi, dan Realisasi Anggaran



Bab Keempat yaitu penutup yang
meliputi: Simpulan Umum, dan
Kendala Pelaksanaan dan
Upaya Mengatasi

4



Songkok atau peci merupakan alat tutup kepala yang digunakan sebagai identitas yang melambangkan mahkota kehormatan bagi sebagian besar kaum lelaki. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, songkok juga kerap dijadikan sebagai simbol identitas adat dan kultur suatu daerah. Satu contohnya adalah songkok recca.

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat tujuan Pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap awal tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Organisasi

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Bupati no. 77 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone

2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tugas :

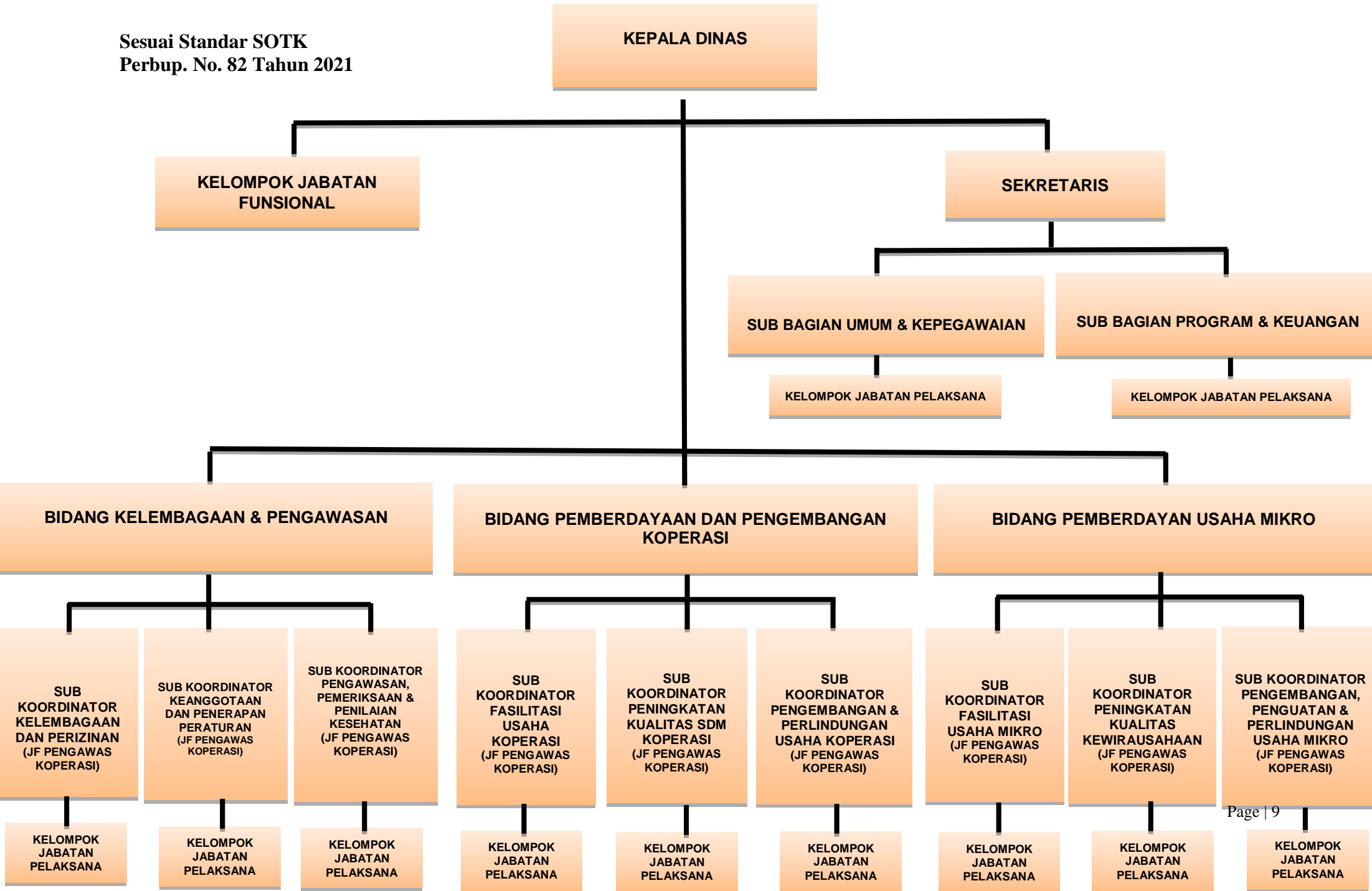
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Standar SOTK
Perbup. No. 82 Tahun 2021

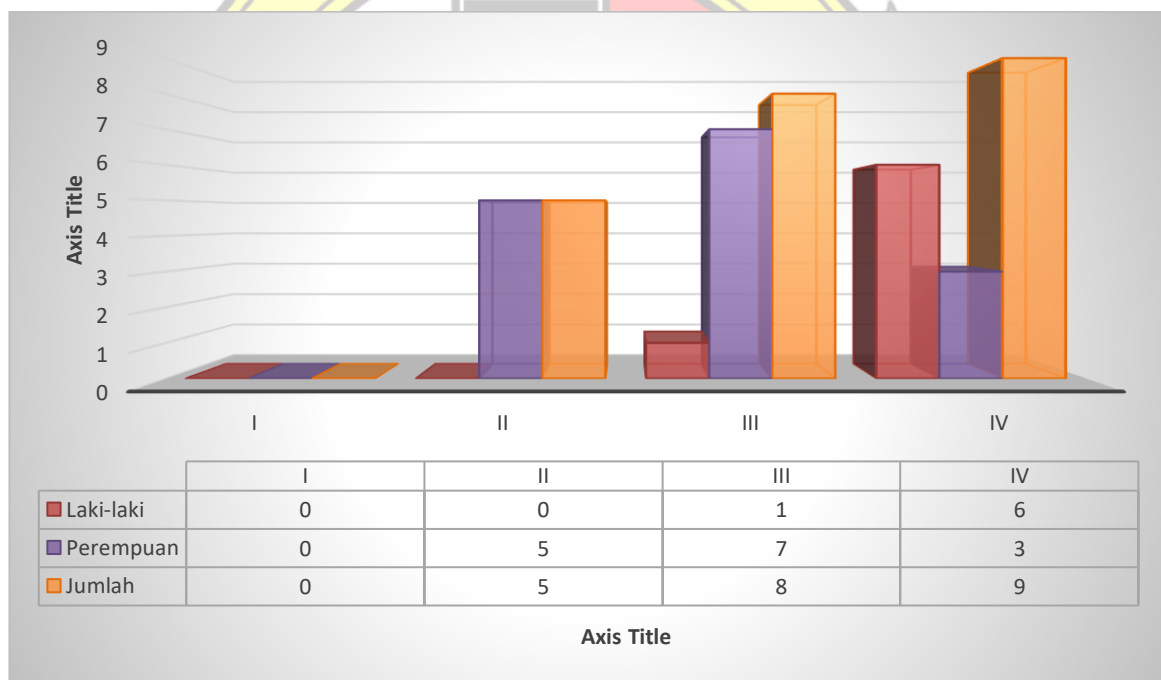


3. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai ASN Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 22 orang.

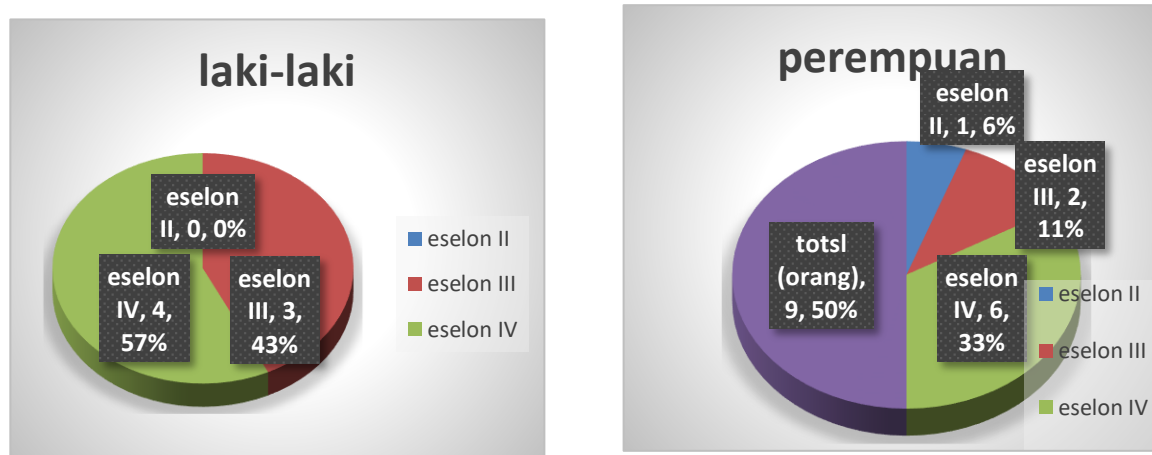
Rincian ASN berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Golongan

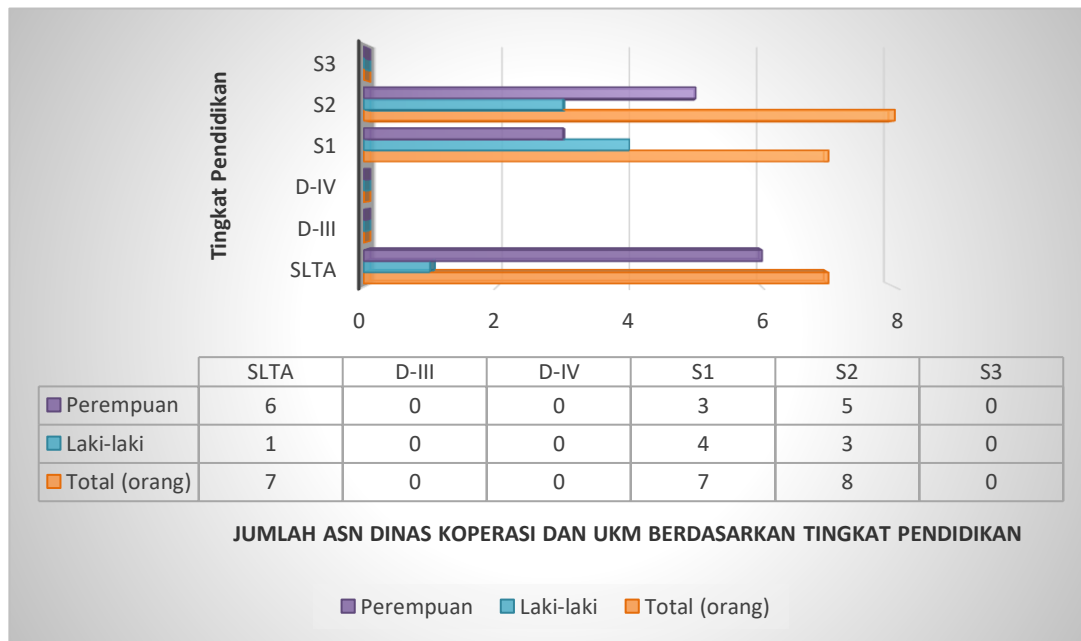


Dari grafik diatas dapat disimpulkan kedalam table berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi Berdasarkan Eselon



Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah :

- Menjadikan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
- Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
- Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
- Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
- Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

E. Aspek Strategis Organisasi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Online Koperasi Kabupaten Bone yang kami sebut “Si Kribo”.

Aplikasi Si Kribo adalah layanan Inovasi yang di hadirkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam rangka mempermudah Akses Layanan pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Serta Layanan Pelaporan Gerakan Koperasi secara Online tersaji Akurat dan tepat Waktu. Aplikasi Si Kribo Ini akan menyajikan data Profil Koperasi, Data Laporan Bulanan, Laporan RAT Koperasi dan semua akan terintegrasi Di ODS (Online Data System) Kementerian Koperasi.

INOVASI PUBLIK TAHUN 2021
APLIKASI SISTEM INFORMASI KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

Selamat Datang di SIKRIBO!
Sistem Informasi Online Koperasi Kabupaten Bone
Merupakan Basis Data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kabupaten Bone secara Online,
sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas,
lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi
kebutuhan Kementerian dan pemangku
kepentingan lainnya.



Kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan, atau sebagai pengawet

PERENCANAAN KINERJA



A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	22,47 %	33,70 %	39,32 %	44,94 %
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi					
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	71,65 %	72,65 %	73,65 %	74,65 %
Meningkatkan Akuntabilitas					

Kinerja Organisasi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	BB	BB	A
Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal					

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM Kabupaten Bone tidak dapat dilepaskan dari upaya pengembangan kompetensi SDM, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha koperasi dan UKM dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bone. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya.

Dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah tahun 2021, maka Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone merumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatkan koperasi yang berkualitas
2. Peningkatkan Usaha mikro menjadi wirausaha
3. Peningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah tahun 2021, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merumuskan Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase Koperasi Aktif
2. Meningkatkan Pertumbuhan Volume Usaha Mikro
3. Meningkatkan Persentase Usaha Mikro dan Kecil
4. Meningkatkan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik
6. Meningkatnya Persentase Pegawai memperoleh nilai SKP “Baik”
7. Meningkatnya Persentase Dokumen laporan capaian Inerja dan Keuangan tersedia tepat waktu
8. Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan Dan data Umum Koperasi

Gambar 2.2 Tujuan, Sasaran, Dinas Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja organisasi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM	1.1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.1.2 Peningkatan administrasi Pelayanan Internal	2.1 Meningkatkan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah 2.2 Meningkatnya Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik 2.3 Meningkatnya Persentase Pegawai memperoleh nilai SKP “Baik” 2.4 Meningkatnya Persentase Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Keuangan tersedia tepat waktu 2.5 Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan Dan data Umum Koperasi tersedia tepat waktu

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
Misi Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	1.1 Meningkatnya Persentase koperasi berprestasi yang berkualitas 1.2 Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	1.1.1 Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 1.1.2 Peningkatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 1.1.3 Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 1.1.4 Peningkatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.1.1 Meningkatkan Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi 1.1.2 Meningkatkan Persentase capaian kualitas kelembagaan koperasi 1.1.3 Meningkatkan Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat 1.1.4 Meningkatkan Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi



DISKOP UKM
KABUPATEN BONE

		1.1.5 Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.1.5 Meningkatkan Persentase capaian produktifitas usaha koperasi
		1.2.1 Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	1.2.1 Meningkatkan Produktifitas Usaha mikro, Kecil menengah
		1.2.2 Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.1.5 Peningkatan Kualitas Pelaku usaha mikro, kecil Menengah

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan Persentase pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT.volume usaha dan aset	43,5 (67/154)	24,43 (43/176)	53,53 (63 +21+22/ 198)	39,32	44,94
	Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	67,16 (9.468 / 14097)	71,65 (12.002/ 16.750)	85,63 (25.666 / 29.971)	73,65	74,65
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	A

	Koperasi dan Usaha Mikro						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM 2018-2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD Tahun 2021. Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan				
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	33,70 %	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	42.368.000

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	72,65 %	Program Pemberdayaan UMKM	179.316.300
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organiasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Sasaran : Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai BB Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	2.807.234.886
Jumlah				3.369.626.036

Sumber Data:



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Koperasi Dan UKM Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone meliputi:

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dan berkelanjutan.

Dengan indikator 1.1:

⇒ **Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset.**

Sasaran 1.1 :

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

Indikator 1.2 :

⇒ **Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**

Sasaran 1.2 :

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha menengah

Dengan Indikator :

⇒ **Persentase jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha**

Tujuan 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Dengan Indikator :

⇒ **Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Sasaran 2.1 :

Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterang an
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan					
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	33,7%	53,53 % (63 +21 +22/ 198)	158,84%	Melampa ui Target
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang	72,6%	85,63 % (25.666/29.971)	117,86 %	Melampa ui Target

Menengah	menjadi wirausaha				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Sasaran : Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	BB	Mencapai Target
Rata-rata				138,35 %	Mencapai target

Sumber Data Renstra Perubahan Dinas Koperas dan UKM tahun 2018-2023 dan ODS
(Online Data Sistem) Koperasi dan UKM

Berdasarkan data di atas, rata rata taget dan realisasi kinerja dapat dicapai dengan maksimal bahkan ada yang melebihi target meskipun ada beberapa capaian yang belum mencapai target. Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM adalah salah satu upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan											-	-
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	41,9 %	43,5 %	48,86 %	53,53 %	-	-	80,35 %	85,43 %	158,8 4%		
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	70,22 %	70,55 %	71,65 %	85,63 %	-	-	95%	100 %	117,8 6 %	-	-
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	B	BB	-	-	B	B	BB	-	-

Koperasi dan UKM												
Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal												
Rata - rata								87,67 %	92,71 %	138,3 5 %		

Sumber Data Renstra Perubahan Dinas Koperas dan UKM tahun 2018-2023 dan ODS (Online Data Sistem) Koperasi dan UKM

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Dan UKM Kab.Bone mengalami kenaikan .dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dan berkelanjutan.

⇒ **Indikator 1.1** : Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset, dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2021 158,84 % dari target 33,70 %

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

Indikator 1.2 :

⇒ **Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha** dengan capaian kinerja melampaui target dengan realisasi 85,63 dari target 72,65 %

Sasaran 1.2 :

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha menengah

Tujuan 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM

Dengan Indikator :

⇒ Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP yang mendapat nilai BB

Sasaran 2.1 :

Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/ 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan							
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	100 %	43,5 %	48,86%	53,53 % (63 +21 +22/ 198)		

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	73,65%	70,5%	71,6%	85,63 % (25.666/29.9 71)	-	-
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	B	B		-	-

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 -2023 ,Data ODS (Online Data Sistem) Keragaan Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra sedikit mengalami penurunan diakibatkan adanya pandemic covid 19 yang sangat berdampak pada realisasi dan capaian kinerja

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisas ikinerja indicator tujuan/sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan			-	
	Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	53,53 % (63 +21 +22/ 198)		
	Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	85,63 % (25.666/29.971)		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB		

	Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal				
--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 -2023 ,Data ODS (Online Data Sistem) Keragaan Koperasi dan UKM

Berdasarkan table 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Dinas koperasi dan UKM tidak terkait dengan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya sehingga tidak ada target ataupun capaian standar nasional yang dicapai.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat table ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan							
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya	158,84%	86,7%	√			

	berdasarkan RAT, volume usaha dan aset						
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	117,86 %	104,28%	√			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	B		√		

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 -2023 ,Data ODS (Online Data Sistem) Keragaan Koperasi dan UKM

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021 dalam kategori **Berhasil**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dan berkelanjutan.

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

⇒ Dari table diatas, terlihat bahwa pencapaian tujuan meningkatkan kinerja koperasi dan UKM, berkelanjutan dengan indicator Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 86,72 %.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator 1.1 : Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset

Definisi : berhasil

Pada table ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 158,84 % dengan realisasi sebesar 53,53% dari target 33,70% hal ini karena:

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi aktif}} \times 100 \%$$

$$= \frac{63 + 21 + 22}{198} \times 100 \% = 53,53 \%$$



Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Adanya pandemic covid 19 mengakibatkan banyak anggota koperasi yang menarik simpanan wajibnya

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone untuk meningkatkan kualitas Koperasi berdasarkan RAT dan volume aset antara lain:

1. Menghimbau para koperasi untuk melakukan RAT disetiap tahunnya.
2. Melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif .
3. Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan
4. UMKM sesuai dengan standart kompetensi



RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)



Konsultasi Mitra Kerja



Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/KSU dan KPRI

Menjalin Komitran Dengan PIP (Pusat Investasi Pemerintah)

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha menengah

Indikator : Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Definisi: sangat berhasil

Pada table ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai **117,86 %** dengan realisasi sebesar **85,63 %** dari target **72,65%** hal ini karena:

$$= \frac{\text{Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Ada}} \times 100 \%$$

$$\frac{25.666}{29.971} \times 100 \% = 85,63\%$$



DATA GDS URM 2021



UNTUK MELIHAT DOCUMENT
SECARA LENGKAP
MEMINDAHI QR CODE DISAMPING

SCAN ME



Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Kurangnya modal usaha para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka
2. Terbatasnya SDM yang berera digital dalam hal pemasaran produk

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone untuk meningkatkan Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha baru antara lain:

1. Melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha secara bertahap
2. Melakukan pembinaan usaha dan peningkatan modal melalui pemupukan modal sendiri perbankan dan non perbankan.


Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran 2.1 : Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal

Indikator : Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP

Definisi : berhasil

Pada table ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP dalam kategori *berhasil*, dengan predikat Nilai BB


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H. A. Mappayukti Lantai III Telp. 0481-24461
WATAMPONE

LEMBAR HASIL EVALUASI SAKIP 2021

KELOMPOK 2
PROF. TA. 2021

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN BONE

NOMOR : 793.04 / 257 / SAKIP / VII / ITDA
TANGGAL : 03 Agustus 2021

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Bobot	NILAI	REF
A.	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,14	
B.	PENGUKURAN KINERJA	25,00	12,19	
C.	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,20	
D.	EVALUASI INTERNAL	10,00	3,54	
E.	CAPAIAN KINERJA	20,00	16,38	
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00	70,46	

BB (Sangat Baik)

Pencapaian di atas telah berhasil, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Adanya perubahan renstra pada tahun berjalan
2. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidangnya

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone untuk meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP antara lain:

1. Memperkuat komitmen pimpinan
2. Memperkuat solidaritas TIM fasilitasi SAKIP

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut table untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone dalam pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel. 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i(e-h)
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan								

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	33,7%	53,53 % (63 +21 +22/ 198)	158,84%	51.13 6.000	40.24 7.000	78,70 %	80,14%
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	72,6%	85,63 % (25.666/29 .971)	117,86 %	47,03 9,000	26'95 5,200	74,39 %	43,47 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	BB	39,73 9,750	34,35 9,750	100 %	

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas koperasi dan Ukm Tahun 2018-2023 Data ODS keragaan koperasi dan UKM

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. **Indikator Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset** dengan capaian kinerja 158,84 % dan capaian anggaran 78,70%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 77,31% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 80,14%.
2. **Indikator Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha** dengan capaian kinerja 117,86 % dan capaian anggaran 74,39 % menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 74,39% dan efisiensi sumber daya sebesar 43,47 %
3. **Indikator Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian nilai BB** dengan pencapaian realisasi anggaran 100,56%

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	158,84 %	Program : :Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Capaian Kualitas kelembagaan koperasi	33,70 %	53,53 % (63 +21 +22/ 198)	158,84 %	

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi			Kegiatan : Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit pan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kab/kota	Persentase Capaian Kualitas kelembag aan koperasi				
			Sub Kegiatan 1 : Pengawasan, Kekuatan, kesehatan, kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan)				
			Sub Kegiatan 2 : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di Monitorin g dan Evaluasi pertahun (Koperasi)				

Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	117,86 %	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Peningkat an Produktivi tas Usaha Mikro Kecil menengah	72,65 %	85,63 % (25.666 /29.971)	117,8 6 %	
			Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase peningkatan an produktivi tas Usaha Mikro Kecil dan menengah				
			Sub Kegiatan : Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi/temu mitra dengan pihak ketiga (UKM)				

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	BB	
			Kegiatan 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub kegiatan 1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja , dan P-Renja tersedia tepat waktu				
			Sub Kegiatan 1.2; Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersedia tepat waktu				
			Sub Kegiatan 1.3 : Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA				

			DPA-SKPD	tersedia tepat waktu				
			Sub. Kegiatan 1.4 : Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPPA tersedia tepat waktu				
			Sub Kegiatan 1.5 : Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)				
			Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub kegiatan 2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat ketersedia an gaji, tunjangan dan tambahan penghasil an PNSD				

				satu tahun anggaran				
			Kegiatan 3 : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub Kegiatan 3.1 : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan BImtek (orang)				
			Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub Kegiatan 4.1 : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat Ketersedi aan alat tulis kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran				
			Sub Kegiatan 4.2 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersedi aan makan- minum harian				

				tamu, tamu sesuai rencana kebutuhan satu tahun				
			Sub Kegiatan 4.3 : Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tingkat ketersedia aan barang cetak dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran				
			Sub Kegiatan 4.4 : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah pembayar an media yang menyedia kan bahan bacaan				
			Sub Kegiatan 4.5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat keikutsert aan aparat daklam kegiatan koordinasi dan konsultasi				

				pelaksana an tupoksi organisasi				
			Sub kegiatan 4.6 : Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan Pengelola an Website				
			Kegiatan 5 : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub Kegiatan 5.1 : Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Pengadaa n perlatan kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran				
			Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				

			daerah					
			Sub Kegiatan 6.1: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersedia an jasa komunika si (telepon, air internet dan listrik)				
			Sub Kegiatan 6.2 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administra si yang mendapat kan jasa keuangan selama setahun				
			Kegiatan 7 : Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemeintah daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP				
			Sub Kegiatan 7.1 : Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah kendaraan Dinas				

			atau kendaraan dinas jabatan					
			Sub kegiatan 7.2 : pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen AC computer dan printer				
			Sub kegiatan 7.3 : Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 -2023 ,Data ODS (Online Data Sistem) Keragaan Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel 3.5 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dan berkelanjutan.

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

- Indikator** : Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset.

dengan target **33,70 %** telah sangat **berhasil** tercapai sebesar **53,53%** atau tercapai **158,84%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha menengah

- **Indikator :** Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

dengan target **72,65 %** telah **Berhasil** tercapai sebesar **31,81%** atau tercapai **117,86 %**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- **Program Pemberdayaan UMKM**

Sasaran 2.1 : Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal

Indikator : Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP

dengan target BB telah **Berhasil** tercapai dengan nilai BB atau tercapai 100 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone pada tahun 2021 dengan melalui 3 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM dan berkelanjutan

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi

1. Melakukan pembinaan terhadap koperasi yang belum melakukan RAT
2. Memberikan Fasilitas Pendampingan kelembagaan dan usaha terhadap koperasi
3. Memberikan Fasilitas kepada koperasi terkait penertiban Sertifikat Nomor Induk

Tujuan 1.2 : Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Sasaran 1.2 : Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha menengah

1. Memberikan bimbingan kepada usaha mikro agar menjadi wirausaha
2. Memberikan arahan kepada pelaku usaha mikro agar dapat bermitra
3. Memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha terkait standarisasi dan sertifikasi produk

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran 2.1: Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal

1. Memberikan Bimbingan dan pelatihan mengenai akuntabilitas kinerja para pegawai Dinas koperasi dan UKM
2. Melakukan pembenahan administrasi pelayanan internal

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bone Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.3.369.626.036,00 sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Kinerja Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berkelanjutan			
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi berprestasi			
Program:	42.368.000,00	32.756.738,00	77,31 %
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	42.368.000,00	32.756.738,00	77,31 %
Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah			

Program:	179.316.300,00	133.393.600,00	74,39 %
Program Pemberdayaan UMKM	179.316.300,00	133,393,600.00	74,39 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pelayan Dinas Koperasi dan UKM Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal			
Program:	2.807.234.886,00	2,935,523,205.00	104,56 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.807.234.886,00	2,935,523,205.00	104,56 %

Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Kesimpulan secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi Dan UKM pada tahun 2021 adalah baik, karena terdapat 7 indikator yang berhasil dicapai sesuai target dan 3 indikator yang belum mencapai target

Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

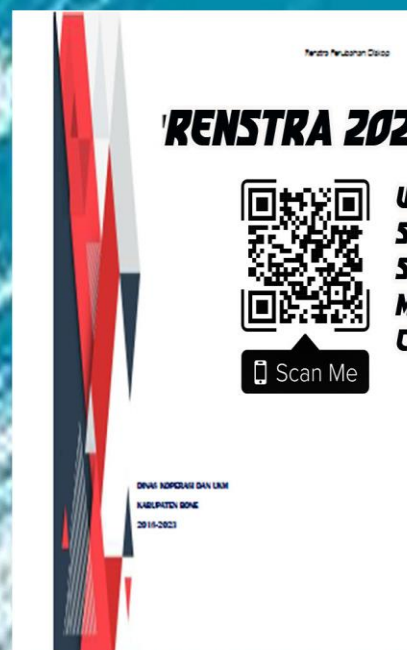
Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Bone telah melouunching Aplikasi SiKrobo, yang menjadi salah satu Langkah strategis menghadapi pandemi di tahun 2021. Aplikasi Si Kribo adalah layanan Inovasi yang di hadirkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam rangka mempermudah Akses Layanan pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Serta Layanan Pelaporan Gerakan Koperasi dan UKM secara Online tersaji Akurat dan tepat Waktu. Aplikasi Si Kribo ini akan menyajikan data Profil Koperasi, Data Laporan Bulanan, Laporan RAT Koperasi, Data UKM dan semua akan terintegrasi Di ODS (Online Data System) Kementerian Koperasi.

rapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi Dan UKM ke depan antara lain tingkat kesiapan masyarakat pada koperasi dan UKM dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM, Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta Kreatifitas dan inovasi, bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausahabaru.



Keterangan :

Proses pembuatan/penenunan kain sapera oleh pelaku UKM didampingi Ibu Kadis Koperasi dan UKM Kab.Bone



Scan Me



PK 2022

TABEL CASACDING DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOPERASI (DAN UKM) KABUPATEN BONE TAHUN 2012

CASCADING 2022

**UNTUK MELIHAT DOCUMENT
SECARA LENGKAP
KEPALA DPD SAMPAI
STAF SILAHKAN
MEMINDAHI QR
CODE DISMAPPING**

